

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VERIFIKASI DAN  
VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI  
DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**HERA YULINDASARI  
07011181823004**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**“Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data  
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional  
di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

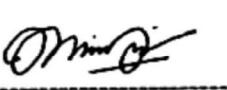
**Hera Yulindasari**

**07011181823004**

Pembimbing I

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

Tanda Tangan



Tanggal

18 Juli 22

Pembimbing II

Dra. Tuty Khairunnisyah, MA  
NIP. 196201051988032004



18 Juli 22



**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA  
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG TAHUN 2021"**

Skripsi

Oleh :

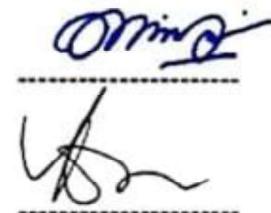
Hera Yulindasari  
07011181823004

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 28 Juli 2022

Pembimbing :

Tanda Tangan

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

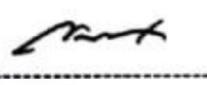


Dra. Tuty Khairunnisyah, MA  
NIP. 196201051988032004

Penguji :

Tanda Tangan

Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001



Januar Eko Aryansah, S.I.P., S.H., M.Si  
NIP. 198801272019031005



Mengetahui,



## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hera Yulindasari  
NIM : 07011181823004  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sungailiat, 16 Desember 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah hasil asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 18 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Hera Yulindasari

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Allah Tidak Membebani Seseorang Itu Melainkan Sesuai Dengan  
Kesanggupannya”.**

**Q.S Al-Baqarah 286**

**Skripsi ini saya persembahan kepada :**

- 1. Kedua orang tuaku tersayang, Ibu Rusiana dan Bapak Supangat**
- 2. Almh. Nenekku tersayang Djauyah**
- 3. Kakak Reskydianto Gustama Putra**
- 4. Keluarga Djaunah Family**
- 5. Seluruh Dosen dan Admin Ilmu Administrasi Publik**
- 6. Sepupu dan sahabat tersayang**
- 7. Almamater Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021” ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat pendidikan Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta civitas akademika. Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan yang membangun demi perbaikan usulan penelitian skripsi yang telah penulis buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna. Penulis menyadari banyak memperoleh bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ibu Rusiana dan Bapak Supangat, yang tak pernah lepas mendoakan dan menjadi suporter utama penulis.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Bapak
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik .
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat berarti dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, MA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat berarti dalam pembuatan skripsi ini.
6. Nenek tersayang Djauyah, kakak Reskydianto Gustama Putra, serta segenap keluarga besar Jaunah Family sebagai orang-orang yang tak pernah lelah selalu mendoakan kesuksesan penulis serta tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Heri Aprian, S.H selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palembang.
8. Bapak H. Azhari Romli, S.Pd., MM selaku Kepala Bidang Jaminan Sosial.
9. Seluruh staf dan pegawai Dinas Sosial yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi informan.
10. Sepupu-sepupu tersayang Dea Syafitri dan Irena Tri Yanuarti yang banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan Intan Fratiwi, Retiya Susanti, Dinda Ayuningisih Yusuf beserta teman-teman AP 18.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih banyak.

Indralaya, 28 Juli 2022

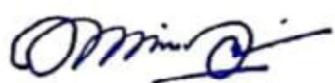
Hera Yulindasari

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021 sudah berjalan cukup baik, namun pelaksanaannya belum dilakukan dengan maksimal terutama dalam verifikasi data, sumber daya dan komunikasi ekternalnya. Hal ini dikarenakan belum adanya pelaksanaan verifikasi data langsung ke lapangan, sehingga penerima bantuan iuran masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Kemudian, belum maksimalnya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sumber daya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Serta, belum ada sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya penonaktifan Kartu Indonesia Sehat. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan jumlah informan yang lebih banyak, serta dapat menggunakan teori yang lebih kompleks agar diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dalam menjelaskan keadaan yang sebenarnya dalam proses pelaksanaan kebijakan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Kinerja Implementasi

Pembimbing I



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

Pembimbing II

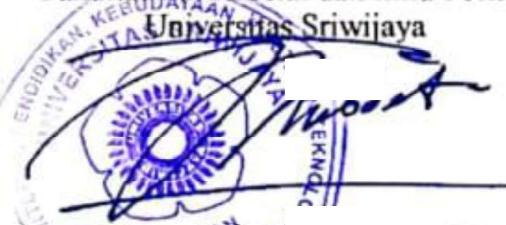


Dra. Tuty Khairunnisyah, MA  
NIP. 196201051988032004

Indralaya, 28 Juli 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



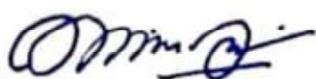
Dr. Muhammad Nur Sudiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the performance of the Implementation of the Data Verification and Validation Policy for Recipients of the National Health Insurance Contribution Assistance at the Social Service of Palembang City in 2021. The method used is a qualitative descriptive method. Sources of data in this study came from primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation and observation. This study uses the theory of policy implementation of Donald Van Meter and Carl Van Horn. The results of this study indicate that the implementation of the data verification and validation policy of the National Health Insurance Contribution Assistance Beneficiary at the Social Service of Palembang City in 2021 has gone quite well, but its implementation has not been carried out optimally, especially in data verification, resources and external communication. This is because there is no direct data verification in the field, so that the recipients of contribution assistance are still not fully targeted. Then, the human resources, budget resources, and facilities and infrastructure resources are not yet maximized in the implementation of this policy. Also, there has been no socialization to the public about the deactivation of the Healthy Indonesia Card. The results of this research recommend that further research be carried out using a quantitative approach and a larger number of informants, and can use more complex theories in order to obtain more accurate research results in explaining the actual situation in the process of implementing of the data verification and validation policy for Recipients of the National Health Insurance Contribution Assistance.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Data Verification and Validation for Recipients of the National Health Insurance Contribution Assistance, Implementation Performance.*

*Advisor I*



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

*Advisor II*



Dra. Tuty Khairunnisyah, MA  
NIP. 196201051988032004

Indralaya, 28 July 2022

Chairman of the Department of Public Administration  
Faculty of Social and Political Science



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Konsep Kebijakan Publik .....	11
2. Konsep Implementasi Kebijakan .....	14
3. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	16
B. Teori yang Digunakan .....	23
C. Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan .....	24
D. Penelitian Terdahulu.....	26
E. Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Definisi Konsep .....	33
C. Fokus Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Informan Penelitian .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknis Analisis Data.....	38
H. Sistematika Penulisan .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Sejarah Singkat Kota Palembang .....	43
2. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Palembang .....	44
3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palembang.....	45
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Palembang.....	47

B. Analisis Kinerja Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021.....	58
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	58
2. Sumber Daya .....	63
a. Sumber Daya Manusia.....	63
b. Sumber Daya Anggaran.....	67
c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	68
3. Karakteristik Agen Pelaksana.....	71
a. Struktur Birokrasi .....	71
b. Partisipasi Pegawai Dinas Sosial Kota Palembang .....	73
4. Sikap atau Kecenderungan ( <i>Disposition</i> ) Para pelaksana .....	76
a. Respon Implementor Terhadap Kebijakan .....	76
b. Pemahaman Implementor Terhadap Kebijakan.....	78
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana .....	79
a. Komunikasi Internal .....	79
b. Komunikasi Eksternal.....	80
6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik .....	83
a. Kondisi Sosial.....	83
b. Kondisi Ekonomi.....	87
c. Kondisi Politik .....	95
C. Diskusi .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>117</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang Tahun 2019-2021 .....	2
Tabel 1.2 Rekapitulasi DTKS Kota Palembang Tahun 2020 dan 2021 .....	3
Tabel 1.3 Hasil Verifikasi atau Pemadanan Data terhadap SK 92/HUK/2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	35
Tabel 4.1 Jumlah pegawai dan Golongan/Pangkat pegawai Dinas Sosial Kota Palembang .....	64
Tabel 4.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Di Dinas Sosial Kota Palembang.....	69
Tabel 4.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang Tahun 2011-2021.....	87
Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2019-Agustus 2021 .....	85
Tabel 4.5 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019-Agustus 2021 .....	89
Tabel 4.6 Matriks Hasil dan Temuan Penelitian .....	101

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Aplikasi SIKS-NG Kemensos RI .....	5
Gambar 1.2 Data PBI JK yang Dinonaktifkan .....	6
Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik yang Ideal .....	12
Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	15
Gambar 2.3 Tahapan Implementasi Kebijakan .....	16
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial Kota Palembang .....	31
Gambar 4.1 Lambang Kota Palembang .....	43
Gambar 4.2 Dinas Sosial Kota Palembang .....	44
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang .....	57
Gambar 4.4 Proses Verifikasi dan Validasi Data PBI JK dengan Sistem SIKS-NG .....	59
Gambar 4.5 Wawancara dengan warga Kelurahan 22 Ilir RT 07 .....	61
Gambar 4.6 Kondisi Kantor Dinas Sosial Kota Palembang .....	70
Gambar 4.7 Struktur Organisasi bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palembang .....	72
Gambar 4.8 Rapat Pembahasan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.....	81
Gambar 4.9 Penduduk Menurut Status Kemiskinan dan Kab/Kota (Jiwa), 2019-2021 .....	88
Gambar 4.10 Kondisi Ekonomi Masyarakat Kota Palembang .....	91

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Tugas Penunjukkan Pembimbing Skripsi.....	118
Lampiran 2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing Skripsi .....	119
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	120
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian .....	122
Lampiran 5. Surat Persetujuan Izin Penelitian .....	125
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I .....	127
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II.....	128
Lampiran 8. Lembar Perbaikan Proposal Skripsi.....	130
Lampiran 9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	131
Lampiran 10. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II .....	132
Lampiran 11. Pedoman Wawancara.....	134
Lampiran 12. Peraturan-peraturan.....	143
Lampiran 13. Dokumentasi Wawancara .....	172

## **DAFTAR SINGKATAN**

Bansos	: Bantuan Sosial
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Inpres	: Instruksi Presiden
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
Kemensos	: Kementerian Sosial
Kepmen	: Keputusan Menteri
Keppres	: Keputusan Presiden
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
NIK	: Nomor Induk Keluarga
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PBI-JKN	: Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional
Perda	: Peraturan Daerah
Permensos	: Peraturan Menteri Sosial
RI	: Republik Indonesia
SIKS-NG	: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – <i>Next Generation</i>
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Sekretaris Negara RI, 2004) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Jdih BPK RI, 2009). Menurut konsep kesejahteraan sosial, negara harus memberikan pelayanan dan membina pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan guna menjamin agar warga negara dapat hidup layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar mereka.

PBI merupakan program bansos melalui Kementerian Sosial yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dari BPJS. PBI diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kesulitan untuk membayar iuran tagihan dengan nilai bantuan senilai Rp. 42.000 per bulan. Ada tiga regulasi yang menjadi landasan Kementerian Sosial terkait program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Pertama, pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur bahwa orang tidak mampu dan fakir miskin adalah orang yang menjadi penerima bantuan iuran. Kedua, pada Pasal 8 ayat (2) dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa identitas peserta sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama dan identitas yang menyatu dengan NIK, kecuali bayi baru lahir (Jdih BPK RI,

2018). Ketiga, pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Pelaksanaan pendataan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang tepat sasaran perlu diverifikasi dan divalidasi agar data fakir miskin dan orang tidak mampu dapat dimutakhirkan. PBI-JKN dirancang bagi masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah. Data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan Menteri. Oleh karena itu, untuk menentukan masyarakat layak menerima bantuan Jaminan Kesehatan, Kemensos RI melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang**

<b>Tahun</b> <b>(1)</b>	<b>Jumlah (000 jiwa)</b> <b>(2)</b>	<b>%</b> <b>(3)</b>
2011	210,01	14,13
2012	206,49	13,59
2013	205,99	13,36
2014	202,31	12,93
2015	203,12	12,85
2016	191,95	12,04
2017	184,41	11,40
2018	179,32	10,95
2019	180,67	10,90
2020	182,61	10,89
2021	194,12	11,34

*Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*

Selama masa pandemi Covid-19, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Palembang mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Palembang mencapai 194,12 ribu orang (11,34 persen). Peningkatan angka kemiskinan sebesar 11,51 ribu orang dibandingkan kondisi tahun 2020 yang sebesar 182,61 ribu orang (10,89 persen). Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

yang diterapkan beberapa kali selama pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian masyarakat. Penduduk yang terdampak tentu kehilangan sumber pendapatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Dengan masifnya dampak pandemi Covid-19 terhadap penurunan tingkat perekonomian yang berkorelasi dengan peningkatan angka kemiskinan di Kota Palembang, pemerintah mengeluarkan program jaring pengaman sosial, salah satunya di bidang kesehatan yaitu program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional KIS. Pemberian bantuan ini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai acuan dalam menetapkan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

**Tabel 1.2 Rekapitulasi DTKS Kota Palembang Tahun 2020 dan 2021**

No	Kecamatan	Jumlah DTKS Tahun 2020	Jumlah DTKS Tahun 2021
1	Ilir Barat I	9.803	43.877
2	Ilir Barat II	16.063	46.427
3	Ilir Timur I	6.687	28.343
4	Ilir Timur II	8.372	33.848
5	Ilir Timur III	8.894	20.162
6	Bukit Kecil	4.570	18.645
7	Sukarami	11.820	51.102
8	Kemuning	7.799	31.353
9	Kalidomi	14.924	45.784
10	Sako	10.222	29.569
11	Sematang Borang	9.542	21.081
12	Alang-Alang Lebar	4.852	24.667
13	Gandus	13.501	52.225
14	Kertapati	35.924	84.070
15	Plaju	16.847	52.356
16	Seberang Ulu I	28.112	65.611
17	Seberang Ulu II	18.808	64.120
18	Jakabaring	17.301	34.270
<b>Jumlah Kota Palembang</b>		<b>244.041</b>	<b>747.510</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang*

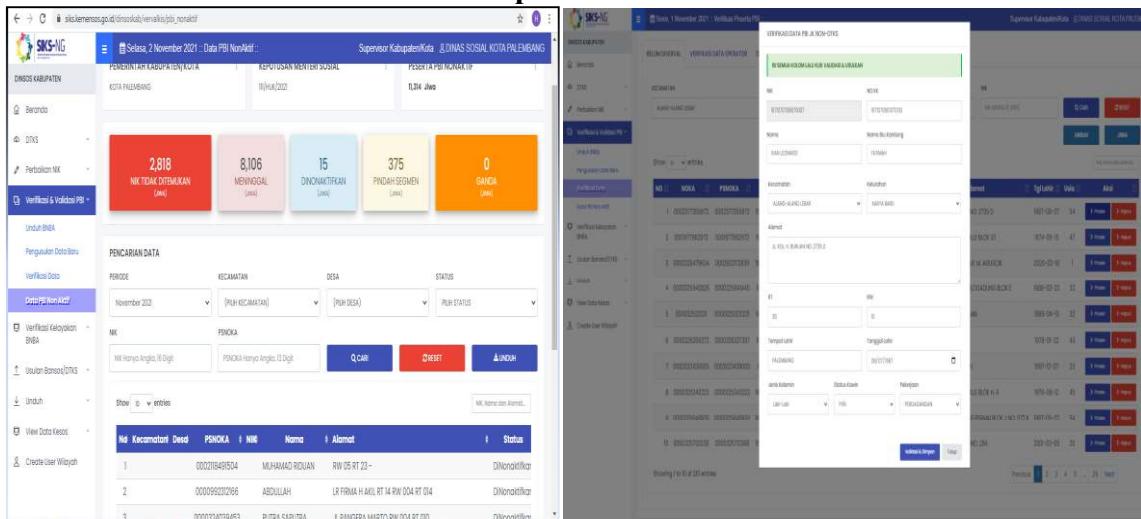
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang memuat data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Palembang yang

masuk DTKS berjumlah 244.041 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2021 penduduk Kota Palembang yang masuk DTKS mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 747.510 ribu jiwa. Hal ini dikarenakan selama pandemi covid-19, masalah ekonomi dan kesehatan mengalami ketidakstabilan di Kota Palembang.

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya menjadikan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) sebagai panduan dalam melakukan pendataan peserta penerima bantuan (Kementerian Sosial RI). Tujuannya adalah :

1. Tercipta persamaan pandangan dan aksi antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan validasi dan verifikasi data PBI Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Terlaksananya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Data PBI-JKN divalidasi dan diverifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tersedianya data terkini orang tidak mampu dan fakir miskin peserta PBI-JKN dan tepat sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi  
Verifikasi dan Validasi bertujuan untuk memeriksa dan mengkaji kebenaran data fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menjamin kebenaran data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, selanjutnya menetapkan kesahihan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai data PBI-JKN, serta tersedianya data fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta PBI-JKN yang terbaru dan tepat sasaran.

**Gambar 1.1 Aplikasi SIKS-NG Kemensos RI**



Sumber : <https://siks.kemensos.go.id>

Proses verifikasi dan validasi data PBI JKN dapat dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah dapat melakukan perubahan atau perbaikan data DTKS, serta melakukan verifikasi dan validasi data PBI JK melalui aplikasi SIKS-NG. Proses verifikasi dan validasi data PBI-JKN ini dilakukan setiap bulan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 92/HUK/2021 (Kementerian Sosial RI, 2021) tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021 menetapkan bahwa data DTKS bagi Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN tingkat nasional yang aktif sebanyak 74.420.345 jiwa sudah padan dengan DTKS. Sementara itu, sebanyak 12.633.338 jiwa data PBI-JKN dinonaktifkan karena data tersebut tidak masuk dalam DTKS. Hal ini dikarenakan faktor perpindahan segmen, meninggal dunia, data ganda, dan NIK yang tidak *online* di Disdukcapil. Oleh karena itu, data yang dinonaktifkan akan dilakukan perbaikan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing daerah. Data yang telah dilakukan perbaikan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan harus diverifikasi

kelayakannya oleh pemerintah kabupaten atau kota paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ini. Rincian lengkap *by name by address* penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat diunduh pada sistem informasi kesejahteraan *next generation* / SIKS-NG yang dikelola Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

**Gambar 1.2 Data PBI JK Kota Palembang yang Dinonaktifkan**

1	NM DESACAPIL	ALAMAT	NAMA	NOKK	NIK	JENIS_KELAMIN	STATUS
2	-	LR SRI RAYA 06 NO 49 A RW 015 RT 042	JAHRI	'1671141112070011	'1671142008390002	Laki-Laki	Meninggal
3	-	JL AIPTU A WAHAB 15 ULU RW 004 RT 012	ALFINA DAMAYANTI	-	'1671174706010001	Perempuan	Ganda
4	OGAN BARU	JL KI KEMAS RINDO RW 005 RT 029	MARYAM	'1671132809090019	'1671026008720005	Perempuan	Ganda
5	ULU	LRG TERUSAN I	BAYI NYONYA LINDA	-	'1671121405200036	Laki-Laki	Tidak Ditemukan
6	SUKA RAMI	JL CEMPAKA PURWODADI	RIKA NILA PARWATI	'1671072605070002	'1671075607010009	Perempuan	Pindah Segmen
7	SEMBILAN-SEPULUH ULU	JL TEMBOK BARU LR SEPAKAT RW 003 RT 016	ROSADA	'1671022201070022	'1671175410840001	Perempuan	Meninggal
8	1 ULU	LR SUNGAI GOREN	HENDRA	'1671021104070070	'1671010110930005	Laki-Laki	Ganda
9	-	RW 01 RT 05 -	RIO RAMADHON	'1671021311060052	'1671021305090005	Laki-Laki	Tidak Ditemukan
10	SUKAJAYA	JL SUAK PERMAI BLOK B2-23 RT 60 8	MEDI SISWANTO	'1671072507070063	'1671071505960013	Laki-Laki	Pindah Segmen
11	SUKAJAYA	JL ABUSAMAH LR KELUARGA 1 RT 14	RINALDI ALDIANJA	-	'1671071404000016	Laki-Laki	Pindah Segmen
12	TALANG PUTRI	JL KARANG LUJUR RT 27 RW 07	SURATI	'1671142105070045	'1671145606800007	Perempuan	Meninggal
13	5 ILIR	JL SULTAN SYAHRY RW 004 RT 014	JARNI	-	'1671061001660005	Perempuan	Tidak Ditemukan
14	SUKA MAJU	JL GOTONG ROYONG RW 009 RT 007	KAILA	-	'1671085511070002	Perempuan	Tidak Ditemukan
15	SUKAJAYA	JL SUAK SUKABANGUN 2 RW 008 RT 081	WILIANA	-	'1671076207890003	Perempuan	Tidak Ditemukan
16	TANGGA TAKAT	LR SENTOSA RW 006 RT 018	MARSIB DARWIS gd bu 0001798205567	-	'1671030304680018	Laki-Laki	Tidak Ditemukan
17	SUKAJAYA	JL SUNGAI SADAPAT RW 008 RT 041	AHMAD RISKY	'5203060408070079	'520306010790014	Laki-Laki	Tidak Ditemukan
18	5 ILIR	JLN BBG UTOYO LRG SIANJUR 2,	BAYI NYONYA SOLEHAR	'1671062306090014	'1671062509140006	Laki-Laki	Tidak Ditemukan
19	SAKO	JL REJUNG RW 001 RT 03	ALDI	-	'1607110909030005	Laki-Laki	Ganda
20	1 ULU	JLN. H. FAQIH USMAN	BAYI NYONYA LENI MARLINA	-	'1671021609080007	Laki-Laki	Tidak Ditemukan
21	TANGGA TAKAT	JL KH AZHARI LR INDAH KARYA RT 09 RW 003 RT 009	ASMAH	-	'1671035006650006	Laki-Laki	Tidak Ditemukan
22	KEMANG AGUNG	LRG SAUDAGAR YUCING RT 06 RW 02	SONIA	'1671022604120007	'1671136505010003	Perempuan	Tidak Ditemukan
<b>PBNONAKTIF_1671</b>							
Ready   Count: 13          112%							
E	F	G	H	I	J	K	
40638 -	JL DEMAK RT 10 RW 04	TERI SUSYANI	-	'1671024109880010	Perempuan	Tidak Ditemukan	
40639 SUKODADI	II GOTONG ROYONG RT 004 RW 001	SAI AMI	-	'1671077001500003	Perempuan	Tidak Ditemukan	
40640 BUKIT BARU	JL MACAN LINDUNGAN RW 005 RT 008	TOIBAH	-	'1671046110360001	Perempuan	Tidak Ditemukan	
40641 KERAMASAN	JL PUTRI DAYANG RINDU RT 06 RW 01	AHMAD RAMLAN	-	'1071131106840003	Laki-Laki	Tidak Ditemukan	
40642 KARYA JAYA	KARYA JAYA RT 025 RW 009	SOLEHA	'1671131109070017	'1671135008790007	Perempuan	Ganda	
40643 PULO KERTO	PERUM GRIYA ASRI RW 001 RT 001	ILMIYATI	'1671120406070004	'1671125808690004	Perempuan	Pindah Segmen	
40644 SEMBILAN-SEPULUH ULU	LR SUNGAI AUR RT 18 RW 04	ALI SAID	'1671023008070027	'1671022606700006	Laki-Laki	Meninggal	
40645 SUKA BANGUN	JL SOSIAL RW 002 RT 014	MUHAMMAD AGUST NURWAHYUDI	-	-	Laki-Laki	Tidak Ditemukan	
40646 -	JL SYAKYAKIRI RW 011 RT 039	M TONI	-	'1671121206890015	Laki-Laki	Meninggal	
40647 DUA ULU	LRG.P.NANGYU RW 001 RT 003	YATI	'1671021508080083	'1671025206730012	Perempuan	Meninggal	
40648 SEI LAIS	JL MAY ZEN LR LAMA RT 20 RW 04	YUNUS	-	'167104211660011	Laki-Laki	Ganda	
40649 SIRING AGUNG	JL KETAHUN RW 004 RT 002	ACHMAD LUTFI, ST	-	'1671041910770008	Laki-Laki	Tidak Ditemukan	
40650 SRI JAYA	JL SWADAYA RW 013 RT 044	HOSIA	'1671081001000170	'1671077112550089	Perempuan	Ganda	
40651 -	RW 13 RT 49 -	RAHMAN SUSANTO	-	'1671022908930002	Laki-Laki	Ganda	
40652 KEMANG AGUNG	JL JEPANG RT 29 RW 06	RETNO MT	'1671130708070043	'1671135103000010	Perempuan	Pindah Segmen	
40653 DELAPAN ULU	JL MAYEND HM RYACUDU RW 004 RT 025	SYAMSUDIN	'1671022605070012	'1671020102320004	Laki-Laki	Meninggal	
40654 26 ILIR	LR LIMBUNGAN NO 206 RW 003 RT 008	DODY IRAWAN	-	'1809040104870005	Laki-Laki	Tidak Ditemukan	
40655 LOROK PAKJO	JL BINTAN RW 004 RT 014	TEDDY F	'1671040310060021	'1671043008640001	Laki-Laki	Tidak Ditemukan	
40656 SUKODADI	JLN PMD RT 03 RW 01 KEL SUKODADI	PARIDJAN	-	'1671070804240002	Laki-Laki	Tidak Ditemukan	
40657 SUNGAISELINCAH	JL KOMP INTAN SENGGUNYIT RW 001 RT 031	NURHAYATI	'1671100609070019	'1671104104500003	Perempuan	Meninggal	
40658 -	JL AIPTU A WAHAB RW 004 RT 030	ABDUL KADIR	'1671022801080006	'1671130105520003	Laki-Laki	Ganda	
40659 SIRING AGUNG	JL SEI LEKO RW 002 RT 002	ADAM RIZAL	-	'1671043003840007	Laki-Laki	Tidak Ditemukan	
40660 20 ILIR D IV	JL LETNAN MUROD NO.243	HERI ESKA	'1807030501100091	'1807030410710001	Laki-Laki	Tidak Ditemukan	
<b>PBNONAKTIF_1671</b>							
Ready   Count: 13          112%							

*Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang*

Di Kota Palembang, data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif sebanyak 407.750 jiwa dan telah padan dengan DTKS. Sementara itu, sebanyak 40.660 jiwa data warga PBI-JKN di Kota Palembang dinonaktifkan. Kementerian Sosial secara bertahap akan menonaktifkan dan menghapus data yang belum masuk DTKS. Oleh karena itu, data yang

dinonaktifkan tersebut harus segera diverifikasi kelayakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota paling lama 2 dua bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini. Berikut hasil verifikasi atau pemadanan data terhadap SK 92/HUK/2021.

**Tabel 1.3 Hasil Pemadanan Data terhadap SK 92/HUK/2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang**

Meninggal	Pindah Segmen	Ganda	NIK Tidak Valid
9.633	4.027	8.230	18.770

*Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang*

Data nonaktif sebanyak 18.770 jiwa ini akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial. Data dengan status meninggal, pindah segmen, dan ganda akan dihapus dari Penerima Bantuan Iuran kemudian akan digantikan dengan pendaftaran PBI yang baru. Namun, jika masyarakat mengetahui penonaktifan Kartu Indonesia Sehat milik mereka, maka mereka harus segera melaporkan masalah penonaktifan ini ke Dinas Sosial Kota Palembang paling lambat 6 bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan. Apabila data mereka dikategorikan sangat layak menerima bantuan, maka akan dilakukan verifikasi dan validasi untuk diajukan kembali menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.. Data PBI JKN yang dinonaktifkan dikirim langsung oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pusat ke Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG, yang kemudian akan dilakukan verifikasi dan validasi data. Proses verifikasi dan validasi data PBI JKN di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021 hanya dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG tanpa ada verifikasi data langsung ke lapangan.

### Gambar 1.3 Proses Verifikasi Data PBI JK Tahun 2021

**ISI SEMUA KOLOM LALU KLIK VALIDASI & USULKAN**

NIK	NO KK	
1671156303880003	167115301120006	
Nama	Nama Ibu Kandung	
TRI UTAMI	RUSDEWI	
Kecamatan	Kelurahan	
ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	
Alamat		
JL. PERJUANGAN PULOGADUNG BLOK E		
RT	RW	
53	10	
Tempat Lahir	Tanggal Lahir	
PALEMBANG	03/23/1988	
Jenis Kelamin	Status Kawin	Pekerjaan
Perempuan	Kawin	KARYAWAN SWASTA

*Sumber : SIKS-NG PBI JK Dinas Sosial Kota Palembang*

Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa pada saat melakukan verifikasi terhadap data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021 masih ditemukan ketidaksesuaian kriteria penerima bantuan iuran, dapat dilihat dari pekerjaan warga tersebut adalah karyawan swasta. Hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Jika dilihat dari pekerjaan tersebut masyarakat akan berpendapat bahwa karyawan swasta memiliki gaji sesuai dengan UMR sehingga hal ini dapat memicu pro kontra di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang membuat progres verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal, yaitu Pertama, dikarenakan waktu pengaksesan aplikasi SIKS-NG yang terbatas dari pusat maka proses verifikasi dan validasi membutuhkan banyak tenaga kerja atau petugas dalam

mengerjakan verifikasi melalui aplikasi SIKS-NG. Kedua, adanya kendala jaringan dimana pada saat melakukan verifikasi dan validasi jaringan internet atau *wifi* sering kali bermasalah atau *down* sehingga petugas yang mengerjakan kesulitan, dan pada akhirnya harus menggunakan jaringan internet pribadi atau *hotspot* dari hp mereka masing-masing. Ketiga, adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah selama masa pandemi, sehingga tidak ada petugas yang melaksanakan verifikasi data langsung ke lapangan sehingga proses verifikasi hanya dikerjakan melalui sistem aplikasi SIKS-NG. Keempat, tidak adanya petugas yang melakukan verifikasi data ke lapangan membuat banyak penerima bantuan iuran yang tidak tepat sasaran. Kelima, penonaktifan Kartu Indonesia Sehat PBI-JKN ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Mereka baru mengetahui adanya penonaktifan ini ketika hendak berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Oleh karena itu, Dinas Sosial serta Pemerintah daerah harus segera berkoordinasi dalam memperbaiki proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional sehingga benar-benar mendapatkan data masyarakat miskin yang objektif dan pelaksanaanya dapat dilakukan secara optimal.

Dengan melihat permasalahan diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021”**.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara akademik ataupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Akademis, hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan verifikasi dan validasi data bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di Dinas Sosial Kota Palembang tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, sebagai bahan perkembangan Ilmu Administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan informasi model implementasi kebijakan.
2. Manfaat Praktis, yaitu dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan implementasi kebijakan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Palembang dalam menjalankan kebijakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2020) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Altitiani, V. (2016) ‘KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN’, 5(September). doi:<http://dx.doi.org/10.26418%2Fgov.v5i3.1360>.
- Hepat, D.R.& E.R. (2018) ‘Faktor-Faktor Penghambat Pendataan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Di Kelurahan Heledululaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo’, V, pp. 87–96. doi:<https://doi.org/10.37606/publik.v5i2.28>.
- idayat, T. (2021) ‘Keadaan Ketenagakerjaan Kota Palembang Agustus 2021’, (17), pp. 1–10. Available at: <https://palembangkota.bps.go.id>.
- Imron, M.A. (2004) ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATAKELOLA PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI JATIM Oleh: M. Ali Imron Rosyadi Dinas Kesehatan Pemprov. Jatim’, (40), pp. 237–251. doi:<https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.711>.
- Jdih BPK RI (2009) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial’, pp. 12–42. Available at: <http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20processing%20workflows.pdf>.
- Jdih BPK RI (2018) ‘Perpres Nomor 82 Tahun 2018.pdf’.
- Kementerian Sosial (2019) ‘Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019’, pp. 1–9.
- Kementerian Sosial RI (2021) *SK\_PBI\_NO\_92.pdf*.
- Maulana, A. (2019) *implementasi kebijakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN) (studi di kecamatan Ambulu keabupaten*

*Jember).* universitas jember.

Moleong, L.J. (2016) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2003) *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. (2012) *Public Policy Edisi Keempat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. (2017) *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pangestika, I.S. (2019) ‘Analisis Keikutsertaan Masyarakat Miskin Sebagai Peserta PBI JKN di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman’. Available at: <http://scholar.unand.ac.id/52438/>.

Perdani, A.W.C. (2021) *Updating Data Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Lumajang, Digital Repository Universitas Jember*.

Rukmini, R. and Oktarina, O. (2018) ‘Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Peningkatan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Di Kota Blitar Dan Kota Malang’, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(3), pp. 199–210. doi:10.22435/hsr.v21i3.418.

Sekretaris Negara RI (2004) ‘UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional’, *Jdih BPK RI*, pp. 1–45.

Sihite, T. (2021) ‘Analisis Kebijakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Desa Sihite II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan’, *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), pp. 82–91. Available at: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30222>.

Subarsono, A. (2005) *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Triwahyudi, D., Shidieq, F.H.A. and Trisnantoro, L. (2021) ‘Evaluasi Implementasi

Kebijakan Tata Kelola Kepesertaan PBI Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Kayong Utara Dan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat', *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 24(02), pp. 66–74. Available at: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk>.

Usman, H. dan P.S.A. (2011) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widiawati (2013) ‘Evaluasi Proses Pendataan Program JKN BPJS Kesehatan Di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Landak Widiawati Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Tanjungpura Widiawati Widiawati’, *Universitas Tanjungpura*, 2, pp. 1–12.

Winarno, B. (2012) *Kebijakan Publik*. Jakarta: CAPS.